

MEDIA

JAMKRINDO

MITRA TERPERCAYA DALAM PENJAMINAN



MENGELOLA RESIKO PERUSAHAAN

EDISI
FEBRUARI 2023



OPTIMALISASI SDM PERUSAHAAN

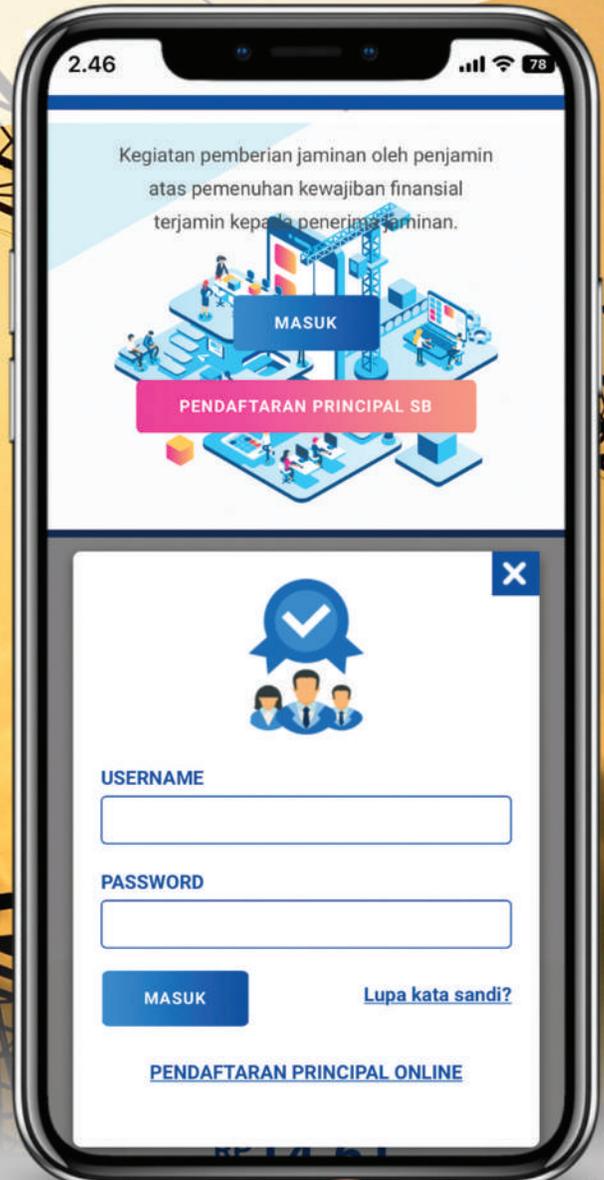
Memasuki kuartal I tahun 2023, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengoptimalkan sumber daya manusia perusahaan dalam implementasi strategi bisnis.

JAMKRINDO RAIH PERINGKAT IDAA+ DARI PEFINDO

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai lembaga pemeringkat kembali memberikan peringkat idAA+ untuk PT Jamkrindo dengan prospek stabil.

Pengajuan penjaminan proyek
semakin mudah dengan
Jamkrindo Online Suretyship (JOS)

www.suretyship.jamkrindo.co.id



SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :
Direksi

Penasihat :
1. Satuan Pengawas Intern
2. Seluruh Kepala Divisi

A. Pemimpin Redaksi :
Dody Novarianto

B. Redaksi :
Agustinus Handoko

C. Editor :
1. Ananda Widhia Putri
2. Lulu Drusyita

D. Bendahara :
Anzil Firdausi Nuzula

E. Desain Grafis / Fotografer :
1. Rully Ariefandi
2. Cahyadi Haryo Pratomo

F. Sirkulasi :
Rudiman

Penerbit
PT Jamkrindo

Alamat Redaksi
Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kavling 6,
Kota Baru Bandar Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 Indonesia.

Telp. (62-21) 6540335
Fax. (62-21) 6540344.6540348
Website : www.jamkrindo.co.id,
E-Mail : Info@Jamkrindo.co.id



RISIKO

Risiko harus dikelola bukan dihindari. Karena risiko akan selalu ada sepanjang perusahaan masih menjalankan roda bisnisnya. Risiko lahir karena adanya tujuan yang ditetapkan. Dengan memiliki tujuan, maka akan selalu ada kemungkinan kejadian yang di luar harapan.

Sebagai perusahaan penjaminan, PT Jamkrindo menghadapi berbagai macam risiko dalam menjalankan bisnisnya. Dengan pengelolaan risiko yang baik, perusahaan terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Tidak hanya di level perusahaan, perekonomian nasional juga menghadapi risiko yang tidak mudah. Pemerintah terus memantau risiko perekonomian dunia di tahun 2023 ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih dipayungi awan gelap. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

Dody Novarianto
Pimpinan Redaksi

INFO KORPORASI

- 18 | EMPAT ELEMEN KUNCI TJSL BUMN
- 20 | PROGRAM TJSL SEBAGAI KOMITMEN BUMN



- 22 | JAMKRINDO RAIH PERINGKAT IDAA+ DARI PEFINDO



- 24 | PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 CAPAI 5,31%



INFO KORPORASI

- 28 | JAMKRINDO TANDATANGANI MOU DENGAN PEMKOT LUBUKLINGGAU



UMKM & KOPERASI

- 30 | FASILITASI UMKM GO EXPORT
- 32 | PERBANKAN PENUHI TARGET KUR 2022
- 34 | PELUANG BISNIS LOKAPASAR MASIH BESAR
- 36 | PERAN PENTING UMKM TOKO KELONTONG
- 38 | KEMENKEU PERKUAT UMKM KALBAR



Berita **Utama**

MENGELOLA RISIKO PERUSAHAAN

Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Komisaris Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Krisna Wijaya mendorong manajemen perusahaan semakin mantap mengelola risiko. Perusahaan tumbuh dan berkembang bukan dengan menghindari risiko, melainkan mengelolanya dengan baik.

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini kemudian menjadikan risiko hal yang wajar dalam kegiatan bisnis. Menurut William G.T. Shedd, tidak ada satu pun entitas bisnis yang tidak memiliki risiko. Ibarat kapal, ia akan lebih aman ketika berada di pelabuhan. Tetapi kapal dibuat bukan untuk itu. Begitu pun juga dengan bisnis. Bisnis akan aman jika diam di tempat, tapi bisnis

dibuat harus tumbuh, berjalan dan berkelanjutan.

Komisaris Utama PT Jamkrindo, Krisna Wijaya memaparkan dalam Workshop Risk Officer PT Jamkrindo di Jakarta, 26 Januari 2023, risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Agar risiko dapat dikendalikan maka diperlukan adanya manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha dan aktivitas entitas bisnis.

Karena risiko sifatnya dinamis, Krisna Wijaya mengatakan para pelaku bisnis bisa menghadapi dan mengendalikan risiko dengan



Komisaris Utama PT Jamkrindo, Krisna Wijaya (tengah) menjadi pembicara dalam Workshop Risk Officer PT Jamkrindo di Jakarta, 26 Januari 2023.

melakukan 3D yaitu dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan. Selain itu menetapkan dan mengelola **risk capacity** minimal meliputi 4R yakni **risk target, risk limit, risk appetite, dan risk tolerance**.

“Selanjutnya, melakukan mitigasi risiko untuk menetapkan pilihan dapat dilakukan dengan 4D yaitu dihindari, dikurangi, dialihkan, dan diterima,” kata Krisna Wijaya.

Dalam melaksanakan program budaya kerja manajemen risiko dalam tubuh suatu bisnis terdapat dua istilah yaitu **hazard** dan risiko. **Hazard** adalah sumber bahaya yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan, kehidupan, properti, atau kepentingan lain yang bernilai.

Meskipun masih berupa potensi, **hazard** pada dasarnya tidak dapat dihilangkan. Sementara risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk atau hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Meski demikian, apabila dikelola dengan baik risiko dapat dikurangi, dihindari, dialihkan dan diterima. Risiko dapat diibaratkan seperti ikan hiu yang buas akan tetap buas karena sifat bawaannya yang melekat.

Berbicara risiko yang akan selalu hadir dalam sebuah bisnis, ada beberapa risiko yang jangan sampai diabaikan yaitu **inherent risk** dan **residual risk**. Kedua risiko ini cukup rentan terjadi pada perusahaan-perusahaan, baik dengan skala bisnis besar maupun kecil.

Pengertian **inherent risk** adalah risiko alami yang melekat dalam suatu proses atau kegiatan tanpa melakukan apa pun untuk mengurangi risiko. Orang yang tidak menggunakan payung tetap dapat beraktivitas, tetapi risikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang menggunakan payung

Sedangkan menurut Gregory Monahan (2008) **residual risk** adalah

jumlah risiko yang terkait dengan tindakan atau peristiwa yang tersisa setelah risiko alami (**inherent risk**) dikurangi oleh pengendalian risiko.

Perusahaan harus mempunyai acuan mana risiko yang bisa diterima, dapat dikurangi, dihindari dan dialihkan. Secara normal risiko meningkat dari rendah ke tinggi dan dalam kasus tertentu bisa saja jalur peningkatan tersebut terjadi secara acak misalnya dari rendah langsung menjadi tinggi.

“Dalam mengelola risiko di tubuh perusahaan, para pelaku bisnis lebih baik mengikuti acuan dari regulator, dapat dikombinasikan dengan jenis-jenis risiko spesifik lainnya yang dianggap penting dan berpengaruh secara signifikan,” ujar Krisna Wijaya.

Perusahaan ibarat tubuh, agar sehat seyogyanya para pelaku di dalamnya mampu mengelola segala macam risikonya. Bukan sebaliknya risiko yang mengelola perusahaan. Dalam bisnis selalu ada peluang bahwa perusahaan justru dikelola oleh risiko. Artinya perusahaan tidak mempunyai sistem pengelolaan manajemen risiko yang baik.

Risiko dalam tubuh perusahaan sama halnya seluruh mitigasi risiko mobil yang disajikan dalam sebuah **dashboard** berupa panel-panel indikator. Selalu ada tanda bahaya berupa lampu merah yang menyala atau berupa tulisan dengan warna mencolok.

“Ketika mesin terlalu panas, jangan lanjutkan perjalanan. Berhenti dan lakukan pendinginan sesuai prosedur. Pelajari penyebabnya agar tidak terulang kembali. mngabaikan mesin yang panas membahayakan baik bagi sopir maupun penumpang. **Dashboard** bagi pengendara dan penumpangnya adalah panduan keselamatan,” papar Krisna Wijaya. (*)



Berbicara risiko yang akan selalu hadir dalam sebuah bisnis, ada beberapa risiko yang jangan sampai diabaikan yaitu inherent risk dan residual risk. Kedua risiko ini cukup rentan terjadi pada perusahaan-perusahaan, baik dengan skala bisnis besar maupun kecil.

MANAJEMEN RISIKO PENJAMINAN

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai perusahaan penjaminan memiliki berbagai macam risiko bisnis diantaranya adalah risiko penjaminan, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, dan risiko transaksi intragrup.



Ilustrasi manajemen risiko.

Peristiwa jatuhnya pasar saham di tahun 2008 membuat seluruh perusahaan di dunia menyadari bahwa risiko perusahaan merupakan masalah yang serius. Kegagalan dalam menghitung dan mengelola risiko dapat berujung pada litigasi, pengurangan aset, hingga kehancuran reputasi bisnis.

Manajemen risiko memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan menentukan risiko sebelum terjadi kerugian. Oleh karena itu,

perusahaan harus mampu menjalankan strategi risiko yang efektif agar dapat mengoptimalkan respons terhadap risiko dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan pada setiap elemen bisnis dalam perusahaan tersebut.

Risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap pencapaian sasaran atau tujuan. Sementara manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan.

“PT Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan kredit punya berbagai macam risiko yang perlu dikelola dengan baik,” kata Boy Herwin Nur, Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Jamkrindo saat memaparkan materi dalam kegiatan Workshop Risk Officer PT Jamkrindo di Jakarta, 26 Januari 2023.

Macam-macam risiko tersebut adalah risiko penjaminan, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, dan Risiko transaksi intragrup.

Risiko penjaminan adalah risiko akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansial kepada penerima jaminan atau risiko akibat dari kegagalan mitra penjaminan bersama (*co-guarantee*) atau penjaminan ulang (*re-guarantee*) memenuhi kewajibannya.

Risiko strategis adalah akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sementara risiko reputasi terjadi akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap lembaga

penjamin.

Risiko hukum adalah akibat tuntutan hukum yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Sedangkan risiko kredit adalah akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur atau investasi, antara lain risiko konsentrasi investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

“Dalam bisnis penjaminan risiko debitur ini kerap terjadi, oleh karena itu kita harus memahami berbagai macam jenis risiko serta aspek-aspeknya,” kata Boy Herwin. Selanjutnya risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Risiko pasar terjadi karena

adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam setiap bisnis yang bergerak pada industri financial dan penjaminan tentu akan selalu ada risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Risiko kepatuhan yaitu risiko akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada risiko transaksi intragrup, sebuah risiko akibat ketergantungan antara perusahaan dan anak perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan dana maupun



Ilustrasi mengelola risiko.

Berita Utama

tidak diikuti perpindahan dana.

IDENTIFIKASI RISIKO PENJAMINAN KONSUMTIF

Dalam mengidentifikasi risiko penjaminan, perusahaan menjamin terjamin yang tidak layak karena kolektibilitas yang kurang baik. Cara memitigasinya adalah dengan mensyaratkan adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meski demikian, Boy Herwin Nur mengatakan harus dipertimbangkan aspek lainnya dari sisi terjamin, seperti nasabah atau yang dijamin tidak dalam kondisi kualitas kredit atau kolektibilitas 4 atau 5 pada lembaga keuangan lainnya. Perusahaan juga harus menganalisa *history* atau perilaku kredit terjamin dari

rekening koran atau kartu angsuran terjamin sebelum menjamin perubahan penambahan plafond dan jangka waktu. Tidak hanya itu, perusahaan pun harus menganalisa usia terjamin dengan sisa masa kerja sebelum menjamin perubahan penambahan jangka waktu.

Risiko yang disebabkan oleh internal perusahaan (operasional) risiko penjaminan, yaitu tidak bisa dilakukan risk sharing ke mitra co-guarantee dan reas karena tingginya nilai automatic cover, yang disebabkan oleh:

- Pengajuan penjaminan CAC melebihi ketentuan yang berlaku.
- Coverage penjaminan 75%-100% untuk seluruh penyebab.
- Sumber subrogasi tak sebanding

dengan pengajuan klaim.

Mitigasi yang dilakukan diantaranya:

- Agar unit bisnis melakukan pembahasan kembali mengenai tingginya batas maksimal dengan skema CAC dan coverage penjaminan 75%- 100% mengingat risiko beban klaim yang dijamin perusahaan semakin besar.
- Melakukan pemilihan mitra co-guarantee dan reas berdasarkan kemampuan likuiditas yang sehat, mengingat risiko penjaminan yang ditanggung cukup besar.
- Unit kerja menyediakan dan melakukan perhitungan pada setiap kerja sama termasuk cadangan klaim yang disesuaikan dengan besarnya plafon kredit



Ilustrasi mengidentifikasi risiko.

dan coverage penjaminan.

Begitu juga dengan risiko yang disebabkan oleh terjamin yaitu risiko penjaminan berupa ketidakmampuan terjamin untuk memenuhi kewajiban, karena mempunyai hutang macet dari lembaga keuangan lainnya, mengalami kegagalan usaha sebagai sumber penghasilan, dan kerusakan maupun kehilangan atas agunan. Mitigasi yang harus dilakukan diantaranya:

- Persyaratan adanya informasi semacam BI/SLIK Checking atau alat uji standar lainnya yang sesuai dengan ketentuan OJK.
- Memahami metode analisis kelayakan dan prospek usaha penerima jaminan untuk skema CAC.
- Melakukan analisa kelayakan dan prospek usaha (sesuai jatuh tempokredit) terjamin dengan skema CBC.
- Mensyaratkan calon terjamin minimal telah menjalankan usaha minimal 2 tahun atau <2 tahun, namun calon terjamin telah mempunyai pengalaman kerja sejenis yang memadai di perusahaan lain.

- Menetapkan besaran minimal dan jenis agunan yang harus disediakan oleh calon terjamin.
- Penerima jaminan perlu memastikan status tempat usaha calon terjamin jelas.

Bila dilakukan dengan baik, manajemen risiko dapat memberi sejumlah kegunaan bagi perusahaan diantaranya sebagai ajang analisis strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya tetap akan terjaga, dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.

Manajemen risiko dapat membuat perusahaan berhati-hati dalam bertindak. Ini tentu membuat perusahaan terhindar dari risiko atau masalah yang menghambat produktivitas. Dengan manajemen risiko, perusahaan bisa berfokus meningkatkan produktivitasnya, baik itu produktivitas dari segi penciptaan produk maupun produktivitas kinerja karyawan. Produktivitas perusahaan pun akhirnya akan memberi dampak positif, berupa keuntungan atau laba. (*)

“

Bila dilakukan dengan baik, manajemen risiko dapat memberi sejumlah kegunaan bagi perusahaan diantaranya sebagai ajang analisis strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya tetap akan terjaga, dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.



Manajemen risiko dapat membuat perusahaan berhati-hati dalam bertindak.

Berita **Utama**

PENGELOLAAN KLAIM DAN SUBROGASI

Bisnis penjaminan tidak akan terlepas dari aspek klaim dan subrogasi. Subrogasi sendiri adalah istilah yang menjelaskan hak hukum yang dimiliki oleh penjamin untuk menuntut secara hukum pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Oleh karenanya para pelaku industri keuangan termasuk bisnis penjaminan seperti PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) perlu melakukan pengelolaan klaim dan subrogasi.

Ceriandri Widuri, Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi PT Jamkrindo menyampaikan, alur bisnis Jamkrindo adalah penjaminan, kemudian klaim dan subrogasi. Definisi klaim merujuk pada UU No. 1 Tahun 2016 Pasal 45 tentang Penjaminan yang berisi pengajuan klaim oleh penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi

kewajiban finansial.

Kemudian mengacu pada POJK No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 tentang tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, atau tuntutan pembayaran perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah kepada perusahaan

penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah, yang telah membayar kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

Timbulnya hak klaim ada dua fase yaitu hak klaim sebelum jatuh tempo dan hak klaim setelah jatuh tempo. Hak klaim sebelum jatuh tempo yaitu telah terjadi tunggakan pokok, bunga denda (bila ada) dan kualitas kredit dinyatakan bermasalah sesuai ketentuan regulator.



Ceriandri Widuri (kanan) saat menerima penghargaan GRC 2022.



Ilustrasi subrogasi.

Sedangkan hak klaim setelah jatuh tempo adalah kredit telah jatuh tempo namun masih terdapat tunggakan dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Aspek lain yang perlu dipahami adalah adanya daluarsa klaim apabila penerima jaminan mengajukan klaim melebihi batas waktu yang diperjanjikan (standar pengajuan klaim 2 bulan setelah timbulnya hak klaim). Adanya pengajuan klaim, dan kelengkapan berkas apabila penerima jaminan melengkapi berkas klaim melebihi batas waktu yang diperjanjikan (standar pemenuhan berkas klaim 1 bulan setelah pemberitahuan tertulis penjamin).

Ceriandri melanjutkan, dalam aspek klaim juga ada gugurnya hak klaim yaitu perjanjian kredit beserta perubahan atau *addendum*-nya dibatalkan oleh pengadilan, dan penerima jaminan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang berlaku.

Selain itu adanya gugur klaim juga dikarenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tidak dibayarkan secara penuh, penerima jaminan tidak mengajukan klaim dengan tenggat waktu melebihi ketentuan, serta penerima jaminan tidak melengkapi dokumen dengan tenggat waktu melebihi ketentuan.

Faktor yang lainnya karena penerima jaminan mengembalikan, mengalihkan atau mencairkan agunan tanpa pemberitahuan tertulis, penerima jaminan tidak melaporkan dan mengajukan permohonan penjaminan atas SPR Kredit Terjamin, dan penerima jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu.

“Tidak hanya itu, gugurnya hak klaim juga karena penerima jaminan atau terjamin terbukti menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan penjaminan, pencairan kredit tidak sesuai dengan perjanjian kredit dan ketentuan umum kredit yang

berlaku di penerima jaminan,” kata Ceriandri Widuri.

Terkait pengelolaan subrogasi yang dilakukan oleh PT Jamkrindo, dasar pengelolaan subrogasi berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata yang berisis subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Mengacu juga pada Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjamin yang mengatur kepemilikan hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial penerima jaminan jika terjamin gagal memenuhi kewajibannya.

Acuan selanjutnya adalah POJK No.2/POJK.5/2017 yang menyatakan sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah, hak tagih

Berita **Utama**

Ilustrasi penerima jaminan melengkapi dokumen klaim.

penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah.

Acuan lainnya yaitu Peraturan Direksi No 23/Per-Dir/XII/2020 tentang subrogasi adalah peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin sesuai proporsi jumlah yang dibayar.

"Mekanisme penagihan subrogasi yang dilakukan oleh Jamkrindo adalah melakukan pengecekan data awal, *mapping* data subrogasi per kantor wilayah, kantor cabang dan debitur, dan melakukan proses rekonsiliasi dengan mitra penerima jaminan," kata Ceriandri Widuri.

Jamkrindo juga akan mengirimkan surat pengiriman subrogasi dan melakukan pengecekan data awal, *mapping* data subrogasi per kantor wilayah, kantor cabang dan debitur, serta mengirimkan surat penagi-

han subrogasi ke mitra penerima jaminan.

Permasalahan subrogasi yang kerap kali terjadi karena penerima jaminan tidak segera melimpahkan subrogasi ke penjamin, debitur sulit ditemui karena sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya, kesalahan penerima jaminan dalam melakukan perhitungan subrogasi. Tidak hanya itu biasanya data subrogasi yang lama belum terdapat di sistem, adanya keterlambatan kantor cabang dalam melakukan entri penerimaan subrogasi ke dalam aplikasi, dan kesalahan pencatatan dan entri subrogasi ke dalam aplikasi.

"Upaya peningkatan subrogasi yang kita lakukan diantaranya rekonsiliasi dengan penerima jaminan, penagihan secara tertulis kepada bank, debitur atau terjamin, pencairan agunan debitur atau terjamin dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan subrogasi," pungkasnya. (*)

“

Mekanisme penagihan subrogasi yang dilakukan oleh Jamkrindo adalah melakukan pengecekan data awal, *mapping* data subrogasi per kantor wilayah, kantor cabang dan debitur, dan melakukan proses rekonsiliasi dengan mitra penerima jaminan.

OPTIMALISASI SDM PERUSAHAAN

Memasuki kuartal I tahun 2023, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengoptimalkan sumber daya manusia perusahaan dalam implementasi strategi bisnis. Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan PT Jamkrindo, Achmad Ivan Sutrisna menyampaikan ada empat kunci yang menjadi fokus perusahaan yaitu *income diversification*, *risk management*, *IT support*, dan *human capital*.

Income Diversification adalah optimalisasi usaha non program, membuat dan mengembangkan model bisnis. *Risk management* adalah *implementation of three lines* yaitu model, GRC, dan *four eyes principle*. Kemudian *IT support* adalah pengembangan sistem jaringan, melakukan evaluasi berkala dan

peningkatan keamanan data.

"Sedangkan *human capital* adalah melakukan pengembangan bakat dan *culture building*," kata Achmad Ivan saat menyampaikan paparan dalam Workshop Four Eyes Principle yang diselenggarakan di Jakarta, 26 Januari 2023.

Dia melanjutkan, dalam mengimplementasikan 4 kunci yang menjadi fokus perusahaan, ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh PT Jamkrindo. Pertama integritas, yaitu komitmen pada nilai kejujuran dan kebenaran secara konsisten, independen dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara objektif,



Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan PT Jamkrindo, Achmad Ivan Sutrisna.

Berita **Utama**

Manajemen dan karyawan Jamkrindo mengikuti rapat koordinasi.

untuk kepentingan perusahaan dan terbebas dari konflik kepentingan.

Kedua adalah profesional yaitu didukung dengan pengembangan kompetensi dari perusahaan dan pengembangan secara mandiri atau *self learning*. Ketiga adalah bertanggung jawab yang berlandaskan pada sikap dan kesadaran siap bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan yang telah dilakukan.

Prinsip keempat adalah sikap kehati-hatian yang berlandaskan pada sikap dan kesadaran siap bertanggung jawab atas setiap pengambilan

keputusan yang telah dilakukan.

“Dan prinsip yang kita gunakan dalam menjalankan 4 kunci strategi bisnis adalah patuh. Di mana kita wajib mematuhi dan tidak bertentangan dengan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan,” katanya.

Lebih lanjut Achmad Ivan menjelaskan pengelolaan fungsi kepatuhan pada PT Jamkrindo mengacu pada Pasal 35 ayat 2 POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Dalam aturan tersebut

tertulis bahwa lembaga penjamin wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan.

Selain itu juga mengacu kepada Pasal 10 POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin diantaranya:

(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

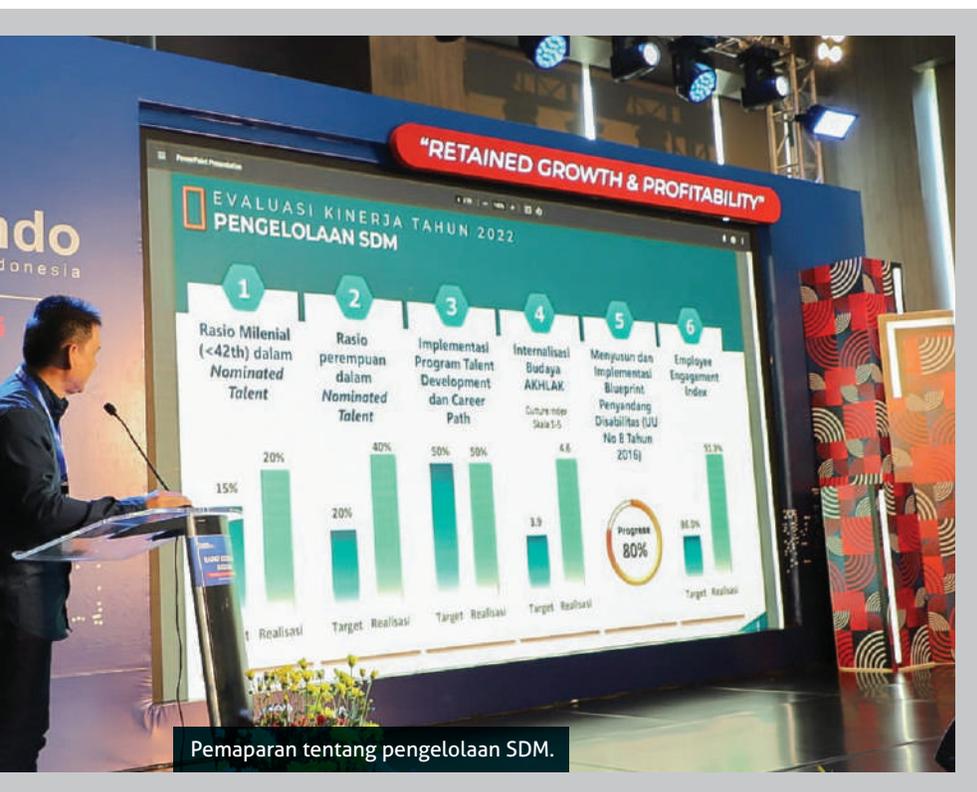
(2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali Direktur Utama.

“Divisi yang membidangi Fungsi Kepatuhan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan kompetensi yang diperlukan dan melakukan perencanaan kepatuhan dengan mempertimbangkan isu dan



Kerja Bersama.





Pemaparan tentang pengelolaan SDM.

pihak yang berkepentingan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Achmad Ivan juga menjelaskan bahwa divisi yang membidangi fungsi kepatuhan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka merencanakan, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan sistem pengelolaan fungsi kepatuhan, yang mencakup anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.

Selain itu Divisi yang membidangi fungsi kepatuhan juga harus bekerja sama dengan Unit Kerja lainnya dalam hal melaksanakan pemenuhan terhadap kecukupan sumber daya manusia, infrastruktur dan sumber daya lainnya yang diperlukan.

“Kita sebagai tim di Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan yang lainnya,” terang Achmad Ivan.

Divisi yang membidangi fungsi kepatuhan juga menurut dapat menggunakan pihak ketiga dalam hal pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan tujuan kepatuhan tercapai dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, serta prinsip kehati-hatian.

Tidak hanya itu divisi yang membidangi fungsi Kepatuhan dapat bekerja sama dengan Unit Kerja lainnya yang relevan untuk memastikan kompetensi pada Divisi yang membidangi Fungsi Kepatuhan sudah tercukupi. Sistem pengelolaan Fungsi Kepatuhan dijalankan berdasarkan rencana kepatuhan untuk memastikan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi ini tercapai.

Tugas utama Divisi Kepatuhan sendiri adalah kepatuhan terhadap regulasi, melakukan pengawasan sistem manajemen, melakukan kajian kepatuhan atau pemeriksaan kepatuhan, serta melakukan kepatuhan privasi data. (*)



Dan prinsip yang kita gunakan dalam menjalankan 4 kunci strategi bisnis adalah patuh. Di mana kita wajib mematuhi dan tidak bertentangan dengan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan.



EMPAT ELEMEN KUNCI TJSL BUMN

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN mengacu pada empat elemen kunci *Sustainable Business Model Canvas*. Keempat elemen kunci tersebut adalah menguntungkan secara komersial, dapat berhasil secara jangka panjang, menggunakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, dan yang terakhir memberi kembali atau meminjam sumber daya dari bumi untuk kemudian dikembalikan.

Melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BUMN wajib melaksanakan program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan BUMN mengacu pada ISO 26000 dan berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Teddy Poernama, Penatakelola Perusahaan Negara Ahli Madya, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN mengatakan,

empat elemen kunci *Sustainable Business Model Canvas* itulah yang menjadi salah satu acuan pelaksanaan program TJSL BUMN.

“Untuk mencapai misi dalam implementasi TJSL ini kita harus mampu memaksimalkan dampak positif. Kita harus tahu dampak positif apa yang akan kita ciptakan atau bisa kita maksimalkan kepada planet,

masyarakat, ekonomi, atau organisasi kita,” kata Teddy dalam acara *Sharing Session Business Model for Sustainable Future* yang diselenggarakan di Hidden Paradise, Tangerang Selatan, Kamis, 26 Januari 2023.

Sebagai contoh, salah satu program yang memberi dampak berkelanjutan pada lingkungan adalah mengurangi sampah perkotaan dan sampah tersebut dimanfaatkan untuk *co-firing*. Kontribusi masyarakatnya (*people*) adalah keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian kontribusi untuk ekonomi adalah benefit secara materiil yang diperoleh dari perubahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) bagi masyarakat yang terlibat, perusahaan dan pemerintah daerah.

Kontribusi lainnya juga bisa diberikan atau dilakukan untuk *reputation*, mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan berdasarkan Paris Agreement, dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* Nomor 1, 3, 8, 11 dan 17.

“Dengan menggunakan empat ele-

men kunci *Sustainable Business Model Canvas*, tidak hanya mampu memetakan dampak positif yang diharapkan tetapi juga akan membantu meminimalkan dampak negatif,” ujar Teddy.

Dari contoh pengolahan sampah sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk planet, efek negatif yang bisa diminimalisir diantaranya mengurangi timbunan sampah perkotaan, mengurangi beban pemerintah daerah untuk pembelian lahan baru TPA.

Kemudian pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) bisa dilakukan dalam skema desentralisasi di masing-masing daerah yang berada di sekitar lokasi PLTU milik PLN. “Bahkan kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.

Teddy melanjutkan, program tersebut berdampak pada *sustainable value proposition*, misalnya menjadi solusi sampah perkotaan, yang tadinya tidak berarti bisa memiliki nilai ekonomi. Sampah yang dikelola menjadi bahan bakar jumputan padat untuk bahan bakar PLTU sebagai pengganti batubara. (*)

“

Untuk mencapai misi dalam implementasi TJSL ini kita harus mampu memaksimalkan dampak positif. Kita harus tahu dampak positif apa yang akan kita ciptakan atau bisa kita maksimalkan kepada planet, masyarakat, ekonomi, atau organisasi kita.



Teddy Poernama berdiskusi dengan peserta Sharing Session.

PROGRAM TJSL SEBAGAI KOMITMEN BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya pada pemerintah, pelanggan, dan mitra-mitra kerja, tetapi juga untuk masyarakat, komunitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sekitar wilayah operasional seluruh BUMN di Indonesia.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bisa diartikan

sebagai tanggung jawab organisasi terhadap dampak dari kegiatan dan keputusan organisasi pada masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. TJSL mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan dengan memenuhi peraturan perundangan serta konsisten terhadap norma perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan

dalam hubungan organisasi.

Edi Eko Cahyono Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN mengungkapkan, Terminologi TJSL bukan hal yang baru. Pada tahun 1970-an, kegiatan *philanthropic*, donasi atau *charity* sudah terlebih dulu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

"Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan CSR ini masuk pada tema lain seperti hak asasi manusia,



Edi Eko Cahyono (tengah berkacamata), Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN.

lingkungan, praktik bisnis yang adil, bahkan sampai pada perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab sosial alias *social responsibility*,” kata Edi saat memberikan sambutan dalam acara *Sharing Session Business Model for Sustainable Future* yang diselenggarakan di Hidden Paradise, Tangerang Selatan, Kamis, 26 Januari 2023.

Sebagai perusahaan milik negara, BUMN berkomitmen untuk secara maksimal memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya pada pemerintah daerah, pelanggan, dan mitra-mitra kerja, tetapi juga untuk masyarakat, komunitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sekitar wilayah operasional seluruh BUMN di Indonesia.

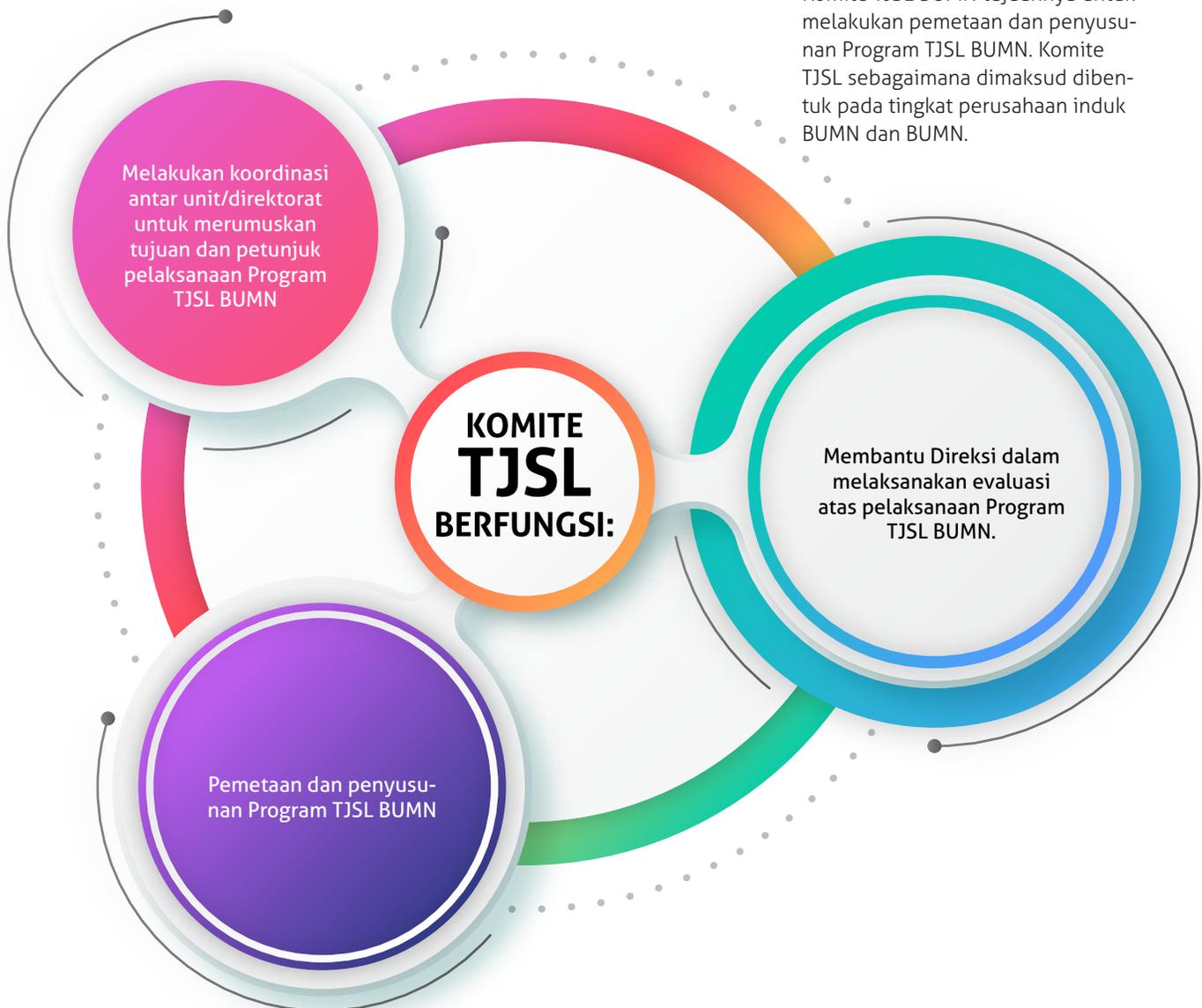
“Tujuan dari TJSL BUMN adalah komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan,” papar Edi.

la melanjutkan, proses implementasi TJSL BUMN terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yaitu menyusun rencana Program TJSL BUMN dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL BUMN. Setelah itu melaksanakan Program TJSL BUMN sesuai dengan Rencana Kerja

dan Anggaran yang telah disahkan antara lain pembiayaan dan pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, bantuan atau kegiatan lainnya serta melakukan kolaborasi.

“Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL BUMN, kami melakukan monitoring kegiatan sesuai dengan perencanaan dan evaluasi program, pencapaian target, berdampak, efektif atau efisien, serta perbaikan ke depan. Dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan kegiatan internal BUMN dimulai dari pelaporan program dan pencapaian periodik BUMN hingga pelaporan kepada publik atau *stakeholders*,” ujarnya.

Edi menambahkan, direksi perusahaan juga membentuk Komite TJSL BUMN tujuannya untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN. Komite TJSL sebagaimana dimaksud dibentuk pada tingkat perusahaan induk BUMN dan BUMN.



Info **Korporasi**

JAMKRINDO RAIH PERINGKAT IDAA+ DARI PEFINDO

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai lembaga pemeringkat, kembali memberikan peringkat idAA+ untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dengan prospek stabil untuk periode 27 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2023.

Pefindo menyatakan, perusahaan penjaminan dengan peringkat idAA memiliki karakteristik keamanan keuangan yang sangat kuat dibandingkan perusahaan lainnya di Indonesia, dengan hanya sedikit perbedaan dibandingkan peringkat yang lebih tinggi. Adapun tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori.

Direktur Utama PT Jamkrindo Hendro Padmono mengungkapkan

raihan peringkat tersebut akan menjadi motivasi perusahaan untuk bekerja lebih keras dalam menghasilkan kinerja terbaik. Perolehan peringkat tersebut, tidak terlepas dari komitmen, integritas dan kolaborasi semua pihak, khususnya Insan Jamkrindo dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan dengan tata kelola bisnis, keuangan dan operasional yang prudent berlandaskan prinsip good corporate governance.

“Peringkat tersebut mencerminkan peran perusahaan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Dengan posisi usaha yang sangat kuat di bidang bisnis jasa penjaminan kredit dan tingkat permodalan yang juga kuat, Jamkrindo dapat berkontribusi optimal dalam mendukung program-program strategis Pemerintah antara lain penjaminan kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Modal Kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi (KMK PEN),” ujar Hendro.



Direktur Utama PT Jamkrindo, Hendro Padmono menjadi pembicara dalam sebuah forum diskusi.

OPTIMISME DI TAHUN 2023

Adapun menyambut tahun 2023, Jamkrindo optimis dapat meraih kinerja baik di tahun 2023. Hal ini mengingat pengalaman perusahaan yang berhasil menorehkan kinerja positif di tahun-tahun menantang khususnya di masa pandemi Covid-19. Di tahun 2023 ini, Jamkrindo menetapkan tema "Retained Growth and Profitability" yang berfokus mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis penjaminan, serta mengembangkan/ memperkuat jejaring dan peran dalam pengembangan UMKMK dan

industri penjaminan.

"Di tahun 2023 kami optimis dapat memperoleh volume penjaminan sebesar Rp 340 triliun, yang didukung dengan peningkatan volume penjaminan KUR, dan volumen penjaminan non KUR," ujar Hendro Padmono.

Adapun realisasi volume penjaminan Jamkrindo di tahun 2022 ialah sebesar Rp 312,36 triliun, yang terdiri dari jumlah penjaminan KUR sebesar Rp 201,30 triliun dan jumlah penjaminan Non KUR sebesar Rp 111,05 triliun. (*)



Kantor Pefindo.



Gedung Jamkrindo.



Peringkat tersebut mencerminkan peran perusahaan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Dengan posisi usaha yang sangat kuat di bidang bisnis jasa penjaminan kredit dan tingkat permodalan yang juga kuat, Jamkrindo dapat berkontribusi optimal dalam mendukung program-program strategis Pemerintah antara lain penjaminan kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Modal Kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi (KMK PEN).

Info **Korporasi**

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 CAPAI 5,31%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga internasional telah mengkoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas resesi terus menurun.

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari per-



Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi.



Aktivitas ekonomi melaju kencang.

tumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

“Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV

tahun lalu, tumbuh 5,01% (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5%. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2022, Senin (6/02).

Info Korporasi

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93% (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25% (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (yoy) seiring dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33% (yoy) dan Konsumsi LNPRT sebesar 5,70% (yoy). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (yoy).

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (yoy) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (yoy).

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48% (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04% (yoy) dan Kalimantan 9,23% (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50% (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah per-



Info **Korporasi**

lambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Menko Airlangga.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menja-

di faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti:

1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya.

2. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya

dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).

3. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral.

4. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan

keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang.

5. Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.

6. Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan Electric Vehicle sebagai tren kendaraan masa depan.

7. Dalam meningkatkan pro-

duktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (reskilling & upskilling), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

8. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.

“Dengan catatan tersebut di atas dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2023 optimis dapat dicapai. Berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (Sumber: ekon.go.id)



Pemerintah mendorong penguatan sektor pariwisata.

“

Peringkat tersebut mencerminkan peran perusahaan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Dengan posisi usaha yang sangat kuat di bidang bisnis jasa penjaminan kredit dan tingkat permodalan yang juga kuat, Jamkrindo dapat berkontribusi optimal dalam mendukung program-program strategis Pemerintah antara lain penjaminan kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Modal Kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi (KMK PEN).

Info **Korporasi**

JAMKRINDO TANDATANGANI MOU DENGAN PEMKOT LUBUKLINGGAU

Sebagai pelopor bisnis penjaminan kredit di Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terus melakukan inovasi dan perbaikan proses bisnis demi pertumbuhan bisnis yang positif. Bahkan saat ini PT Jamkrindo memiliki jaringan kerjasama di bidang suretyship yang sangat luas, baik proyek yang berdasarkan APBN maupun APBD.

Dalam rangka terus mengoptimalkan bisnis suretyship, PT Jamkrindo melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di Jakarta, pada Rabu, 15 Februari 2023.

"Kegiatan sore ini (penandatanganan MoU) menjadi suatu langkah awal dalam peningkatan kerjasama penerbitan suretybond dengan para rekanan maupun subkontrak di Pemerintah Kota Lubuklinggau, baik untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka maupun jaminan pemeliharaan," ujar Abdul Bari, Direktur Kelem-

bagaan dan Layanan PT Jamkrindo.

Kegiatan penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh Walikota Lubuklinggau Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M., Sekretaris Daerah dan Seluruh Pejabat Kepala Dinas Kota Lubuklinggau, Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo Henry Panjaitan, Direktur Keuangan Investasi



Foto bersama pada acara penandatanganan MoU.





Abdul Bari, Direktur Kelembagaan dan Layanan PT Jamkrindo.

dan Manajemen Risiko sekaligus Direktur Pembina Kantor Wilayah Palembang Suwarsito, serta Para Kepala Divisi dan Pemimpin Wilayah PT Jamkrindo Palembang.

Dalam kesempatan tersebut Abdul Bari menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh insan Jamkrindo dengan upaya optimalisasi bisnis suretyship

khususnya di jasa suretybond dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

“Kita tahu saat ini ada potensi sekitar Rp 170 milyar baik untuk jasa suretybond maupun kontra bank garansi di kota Lubuk Linggau. Tentunya potensi ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, baik dari sisi kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur di kota Lubuklinggau, maupun dari sisi pertumbuhan bisnis yang positif bagi Jamkrindo,” imbuh Abdul Bari.

Ia juga menyampaikan inisiatif peningkatan kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau akan sangat bermanfaat untuk semua pihak. Abdul Bari berharap melalui penandatanganan MoU ini setelahnya akan dilakukan aplikasi pengajuan kerjasama penjaminan suretyship atas proyek-proyek yang ada di Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Dikatakan Abdul Bari, PT Jamkrindo melihat kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebuah langkah yang sangat penting dan signifikan sehingga dapat saling memberikan kontribusi dan sinergitas bagi masing-masing pihak untuk optimalisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan.

“Semoga MoU hari ini merupakan sebuah langkah awal untuk kerjasama berkelanjutan dan strategis di masa yang akan datang,” pungkas Abdul Bari. (*)



Kegiatan sore ini (penandatanganan MoU) menjadi suatu langkah awal dalam peningkatan kerjasama penerbitan suretybond dengan para rekanan maupun subkontrak di Pemerintah Kota Lubuklinggau, baik untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka maupun jaminan pemeliharaan.



UMKM & Koperasi

FASILITASI UMKM *GO EXPORT*

Untuk “go global”, tentunya banyak UMKM yang harus berhasil menembus pasar ekspor dunia atau “go export” terlebih dulu. Dukungan Pemerintah untuk UMKM yang ingin “go export” yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.



Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso (dua dari kanan) saat menerima Ketua Umum DPP Aproni Go Export, Suci Kuntarsih.

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan kontribusi sektor itu terhadap PDB telah mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Sektor UMKM terus didorong oleh berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membangkitkan kembali bahkan memajukan sektor tersebut sampai bisa “go global” di masa mendatang, bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam global value chain.

Pada sisi lain, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022, rasio kewirausahaan saat ini masih rendah yaitu sebesar 2,86%. Salah satu penyebab rendahnya angka rasio tersebut yakni dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, khususnya kepada sektor UMKM, yang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang terpaksa mengubah model bisnisnya, bahkan tidak sedikit pula yang harus gulung tikar.

Sisi positif dari perekonomian nasional yang terus stabil dalam dua tahun terakhir, sektor UMKM

pun dapat bangkit kembali, bahkan mereka sudah bersiap menembus pasar ekspor dengan produk yang lebih berkualitas. Untuk “go global”, tentunya banyak UMKM yang harus berhasil menembus pasar ekspor dunia atau “go export” terlebih dulu. Dukungan Pemerintah untuk UMKM yang ingin “go export” yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Selain itu, dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan

kepada Menko Perekonomian untuk pembentukan Satgas Ekspor, yang mengurus cakupan dari masalah akses pembiayaan, pelatihan, akses ke pasar, dan lain-lain. Sebenarnya juga program-program untuk UMKM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian sudah cukup lengkap, semisal Kredit Usaha Rakyat (KUR)," jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi-wijono Moegiarso, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Aliansi Produk Nusantara Indonesia UMKM (DPP Aproni) Go Export Suci Kuntarsih dan jajarannya, di Yogyakarta, Jumat (17/02).

Sesmenko Susi wijono menuturkan, tugas Satgas Ekspor nantinya juga akan terkait peningkatan kapasitas UMKM ekspor. "Menko Perekonomian yang nanti akan mengoordinasikan semua Menteri terkait (dalam pembentukan Satgas Ekspor). (Terkait pelatihan untuk UMKM ekspor) Selain pelatihan

umum, karena kami mengoordinasikan Kartu Prakerja juga, mudah-mudahan dengan terbentuknya Satgas Ekspor nanti akan lebih fokus mengurusinya," tuturnya.

Lebih lanjut, pemanfaatan peran Pusat Logistik Berikat (PLB) akan dimaksimalkan agar dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan pembelian barang modal/mesin, dan akses pemasaran lokal dan global. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah memberikan pemberian insentif fiskal bagi PLB IKM melalui penangguhan PPN & PPNBM.

Beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan program untuk membantu sektor UMKM ekspor tersebut. Misalkan, Kementerian Keuangan yang memberi dukungan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM)

melalui pembebasan PPN dan PPN impor, yang diberikan untuk IKM/UMKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor, serta klinik ekspor untuk memberikan literasi, dan edukasi ekspor bagi UMKM/IKM.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan telah menargetkan penciptaan eksportir-eksportir baru skala UMKM melalui fasilitasi informasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, kerjasama, promosi dan citra, serta peningkatan SDM.

Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah mendorong UMKM Ekspor dan Digital melalui fasilitasi pelatihan manajerial SDM UMKM, pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, penguatan kelembagaan koperasi, dan fasilitasi akses pemasaran ekspor. (Sumber: ekon.go.id)

Berdiskusi tentang UMKM.



UMKM & Koperasi

PERBANKAN PENUHI TARGET KUR 2022

Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 22 Juli 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan target KUR 2023 Rp 460 triliun dan Rp 585 triliun pada 2024.

Perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur kredit usaha rakyat atau KUR memenuhi target penyaluran KUR pada 2022. Adapun tahun ini perbankan akan meneruskan program tersebut dari pemerintah untuk menyalurkan KUR sebesar Rp 460 triliun.

Dihubungi pada Senin (13/2/2023), Sekretaris Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rudi As Atturidha mengatakan, pada 2022 pihaknya telah memenuhi target pemerintah dalam menyalurkan KUR sebesar Rp 40 triliun kepada lebih dari 351.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rudi menjelaskan, penyaluran KUR Bank Mandiri paling besar disalurkan ke sektor produktif, yakni

sebesar Rp 23,9 triliun atau 59,73 persen dari total KUR Bank Mandiri. Tren peningkatan penyaluran KUR Bank Mandiri sektor produktif tecermin dari seluruh sektor. Salah satunya di sektor pertanian yang sepanjang tahun 2022 menyumbang 29,53 persen dari total KUR Bank Mandiri atau senilai Rp 11,81 triliun. Disusul sektor jasa produksi yang mencapai Rp 8,03 triliun di



Pelaku UMKM mengajukan KUR.



Standing banner KUR di kantor perbankan.

2022 atau sekitar 20,07 persen dari total penyaluran.

Adapun pada 2023 Bank Mandiri diberi mandat untuk menyalurkan KUR sebanyak Rp 48 triliun. "Penyaluran KUR akan tetap berfokus pada sektor-sektor produktif yang memberi nilai tambah pada masyarakat," ujar Rudi.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari menjelaskan, sepanjang tahun 2022, BRI telah berhasil menyalurkan KUR sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 252,38 triliun kepada 6,5 juta debitur.

Adapun tahun 2023, pihaknya diberikan target penyaluran KUR Rp 270 triliun. "Kami optimistis akan dapat memenuhi target itu dengan rencana pencairan KUR rata-rata Rp 1 triliun per hari," ucap Supari.

Supari menjelaskan, sumber dana KUR seluruhnya berasal dari bank. Oleh karena itu, KUR bukanlah bantuan dana pembiayaan dari pemerintah, melainkan subsidi bunga dari pemerintah kepada bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR.

Dengan besaran suku bunga KUR mikro 16 persen, lanjut Supari, peran pemerintah adalah memberi

subsidi 10 persen sehingga beban bunga yang dibayarkan masyarakat ke bank menjadi 6 persen.

Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 22 Juli 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan target KUR 2023 Rp 460 triliun dan Rp 585 triliun pada 2024. Adapun total penyaluran KUR pada 2022 Rp 373 triliun.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto mengatakan, program KUR ini sejatinya sangat menguntungkan bank. Dengan target penyaluran KUR Rp 460 triliun pada tahun ini, hal itu sama saja memberikan subsidi bunga kepada perbankan senilai besaran KUR tersebut. Padahal, perbankan sudah meraup untung dari bisnis yang lain selain penyaluran KUR.

Besaran subsidi bunga KUR tersebut membuat risiko penyaluran kredit KUR lebih rendah. Itulah yang membuat perbankan begitu semangat menyalurkan KUR. "Kenapa bank begitu semangat menyalurkan KUR? Sebab, perbankan menikmati untung besar dari KUR karena risikonya hampir tidak ada," ujar Suroto. (Sumber: kompas.id)



Sumber dana KUR seluruhnya berasal dari bank. Oleh karena itu, KUR bukanlah bantuan dana pembiayaan dari pemerintah, melainkan subsidi bunga dari pemerintah kepada bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR.



Ilustrasi belanja daring.

PELUANG BISNIS LOKAPASAR MASIH BESAR

Membesarnya jumlah generasi muda yang mengakses internet dan arus urbanisasi merupakan peluang bagi lokapasar untuk tetap tumbuh. Sekitar 30 persen dari 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan solusi digital untuk aktivitas bisnis ataupun perdagangan mereka.

Tutupnya sejumlah perusahaan penyedia lokapasar tidak lantas membuat bisnis e-dagang meredup. Masih terdapat peluang memperluas jejak perdagangan digital keluar kota metropolitan.

Principal di Kearney, Ishan Nahar, dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Minggu (12/2/2023), di Jakarta, mengatakan, kota di luar metropolitan atau kota urban baru (tier 2-4) di Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 230 juta jiwa, jauh lebih besar daripada

jumlah penduduk kota tier 1 yang hanya sekitar 40 juta jiwa. Populasi penduduk yang lebih besar akan dapat menciptakan basis pelanggan yang lebih luas bagi perusahaan teknologi e-dagang.

Adopsi platform e-dagang yang ada saat ini, dia nilai, masih terbatas hanya pada pemain terkemuka. Sekitar 30 persen dari 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan solusi digital untuk aktivitas bisnis ataupun perdagangan mereka.

“Para pelaku aplikasi super di

bidang e-dagang sebenarnya telah membangun platform untuk UMKM. Namun, kami melihat masih terbuka peluang bagi mereka memperluas layanan ke seluruh rantai operasi UMKM. Di samping itu, kami juga mengamati masih ada ruang bagi mereka untuk membantu meningkatkan pelatihan kompetensi digital untuk pelaku UMKM,” ujar Ishan.

Dua tahun terakhir, lanskap industri e-dagang diwarnai dengan kabar sejumlah pelaku melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),



pembatasan rekrutmen, pivot, ataupun sampai tutup operasional. Sebagai contoh, per 1 Desember 2022, lokapasar Elevenia resmi menutup layanannya. Kemudian, JD.ID akan resmi berhenti beroperasi pada Maret 2023.

Peneliti di Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha, saat dihubungi pada Minggu, mengatakan, industri platform digital, seperti e-dagang, menganut karakteristik pasar dua sisi. Di satu sisi, para perusahaan di dalamnya bersaing di pasar yang sama.

Di sisi yang lain, tatkala perusahaan yang kalah bersaing tumbang, perusahaan yang menang akan semakin besar bisnisnya. Perusahaan yang "menang" bersaing akan semakin sedikit sehingga terjadilah pasar oligopoli.

"Kondisi seperti itu sudah terlihat sekarang. Beberapa perusahaan lokapasar yang unggul di pasar,

antara lain, Tokopedia dan Shopee," ujar Izzudin.

Menurut dia, sektor e-dagang secara umum masih akan tetap tumbuh, termasuk pada tahun 2023. Kendati demikian, dia memperkirakan tingkat pertumbuhannya akan lebih rendah dibandingkan selama masa pembatasan sosial karena pandemi Covid-19.

Berdasarkan laporan riset e-Economy SEA 2022, nilai ekonomi internet Indonesia diproyeksikan mencapai 77 miliar dollar AS pada tahun 2022 atau tumbuh 22 persen dibanding setahun sebelumnya. Laporan yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company ini memperkirakan nilai ekonomi internet Indonesia akan mencapai 130 miliar dollar AS pada 2025, terutama karena didorong oleh e-dagang.

Nilai ekonomi internet yang dimaksud dalam laporan itu diukur dari ukuran nilai barang dagangan (GMV). Dalam laporan e-Economy SEA 2022, tingkat pertumbuhan tahunan GMV sektor e-dagang Indonesia tahun 2021 ke 2022 sebesar 22 persen. Lalu, tingkat pertumbuhan tahunan dari tahun 2022 ke 2025 diperkirakan 17 persen.

Apabila kini muncul TikTok Shop, Izzudin menilai, layanan ini memiliki kecenderungan sasaran pasar yang berbeda dengan lokapasar yang sudah ada. TikTok Shop terlihat kecenderungannya menasar gen Z sebagai pengguna utama aplikasi TikTok.

Dengan serangkaian dinamika yang terjadi di industri e-dagang baru-baru ini, seperti PHK, tutup operasional, dan kemunculan TikTok Shop, dia memandang masih ada peluang bagi perusahaan lokapasar untuk tumbuh. Apalagi, ada tren membesarnya populasi gen Z dan milenial terkoneksi internet, kenaikan jumlah kelas menengah, dan urbanisasi di sejumlah kota. (Sumber: kompas.id)



Para pelaku aplikasi super di bidang e-dagang sebenarnya telah membangun platform untuk UMKM. Namun, kami melihat masih terbuka peluang bagi mereka memperluas layanan ke seluruh rantai operasi UMKM. Di samping itu, kami juga mengamati masih ada ruang bagi mereka untuk membantu meningkatkan pelatihan kompetensi digital untuk pelaku UMKM.

UMKM & Koperasi

PERAN PENTING UMKM TOKO KELONTONG

Toko kelontong memiliki peranan penting tidak hanya bagi perekonomian lokal namun juga berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga kini, toko kelontong masih menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat karena memiliki produk yang bervariasi dan lokasi yang mudah dijangkau.

Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 mampu tumbuh impresif sebesar 5,31 persen (ctc) dan menjadi yang tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir. Tentunya ini tidak terlepas dari pertumbuhan positif seluruh sektor lapangan usaha di Triwulan IV 2022. Tingkat kepercayaan dan konsumsi masyarakat juga berangsur pulih, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen pada Januari 2023 yang tercatat sebesar 123,0, lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2022 yang sebesar 119,9.

Pemerintah terus berupaya mendorong dan menjaga percepatan pemulihan kondisi perekonomian melalui sejumlah strategi dan kebijakan utama. Diantaranya melalui penguatan pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi buffer ketahanan ekonomi nasional.

"Kami berterima kasih kepada seluruh Ibu-Ibu, Bapak-Bapak pemilik toko dan Sampoerna Retail Community (SRC). Karena ekonomi Indonesia tergantung pada daya beli masyarakat. Dan toko kelontong menyediakan barang dengan harga terjangkau," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan **key-note speech** pada acara Pesta Retail Nasional 2023 Sampoerna Retail



Seorang wanita berbelanja di toko kelontong.

Community dengan tema "Bersama SRC untuk Toko Kelontong #JadiLebihBaik".

Toko kelontong memiliki peranan penting tidak hanya bagi perekonomian lokal namun juga berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga kini, toko kelontong masih menjadi bagian penting dari pemenuhan

kebutuhan hidup masyarakat karena memiliki produk yang bervariasi dan lokasi yang mudah dijangkau.

"Pemerintah berterimakasih karena barang-barang yang dijual di toko SRC tidak naik setinggi di negara-negara lain. Jadi benar tadi disampaikan oleh Ketua Umum Kadin, di sini Pemerintah senang, dan UMKM yang ada di ruangan ini ada-

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara Pesta Retail Nasional 2023 Sampoerna Retail Community.



lah pahlawan-pahlawan ekonomi," lanjut Menko Airlangga.

Pemerintah tentunya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan perekonomian dan beberapa dari warung dan juga mitra dari SRC dapat memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung perkembangan

UMKM diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah juga mendorong agar usaha menengah dan besar melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.

"Saya telah beberapa kali melihat toko kelontong SRC, di mana barangnya mempunyai harga yang bersaing dengan modern market yang lain. Artinya keberadaan dan kebersamaan, sekaligus network SRC, telah membuat SRC berdayasaing dibandingkan dengan mini market yang lain. Sekali lagi saya senang bisa berada di tengah para pengusaha tangguh, di tengah para hero ekonomi nasional," pungkask Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koperasi dan UKM yang diwakilkan oleh Staf khusus Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum Kadin, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, dan Direktur PT SRC Indonesia Sembilan. (Sumber: ekon.go.id)



Kami berterima kasih kepada seluruh Ibu-Ibu, Bapak-Bapak pemilik toko dan Sampoerna Retail Community (SRC). Karena ekonomi Indonesia tergantung pada daya beli masyarakat. Dan toko kelontong menyediakan barang dengan harga terjangkau.

KEMENKEU PERKUAT UMKM KALBAR

BPDPKS sebagai BLU dibawah Kemenkeu mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan, bertempat di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Barat pada tanggal 08 sampai 10 Februari 2023.

Kegiatan ini adalah salah satu upaya mendorong penguatan UMKM dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Keuangan khususnya di Wilayah Kalimantan Barat.

Rangkaian pembukaan acara ini diadakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Para Bupati di Kalimantan Barat serta dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan RI.

Dalam pembukaannya Wamenkeu menyampaikan "Kemenkeu satu juga harus menjadi Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah berperan sebagai koordinator dari berbagai program strategis kewilayahan seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM, Regional Chief Economist, Joint Penerimaan, serta sinergi dengan pihak eksternal".

Rangkaian kegiatan meliputi Seremoni Pembukaan, berbagai talkshow Sinergi Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat, meliputi: Talkshow Segera Lakukan Peadanan NIK - NPWP (DJP Kalimantan Barat), Lokakarya dan Temu Bisnis UMKM (DJBC Kalimantan Bagian Barat), Talkshow: Pemberdayaan UMKM dalam Implementasi KKP Domestik (DJPb Provinsi Kalimantan Barat), Talkshow Lelang dan Amal (DJKN Kalimantan barat), serta Talkshow UMKM Go Digital (BPDPKS).

Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah



Pelaku UMKM di Kalimantan Barat.

dan Koperasi (UMKM) binaan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat dan BPD- PPS, antara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Asosiasi Kelapa Sawit, serta Booth Kemenkeu satu.

Diakhir penutupannya, Wamenkeu juga berpesan agar Kemenkeu Satu perlu mengangkat marwah Kantor Kemenkeu di daerah, salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN. Pemahaman harus diperkuat, misalnya terkait perekonomian di daerah, APBD, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial, kondisi lapangan kerja, dan sebagainya termasuk juga sektor UMKM.

Selanjutnya, kegiatan Kemenkeu Satu ini akan berlangsung selama tahun 2023 ini ke sepuluh propinsi yang dimulai dari Kalimantan Barat guna mendukung UMKM terus tumbuh melalui APBN dengan memanfaatkan transaksi digital agar mampu bersaing secara global.

Salah satu komitmen dukungan Kemenkeu kepada UMKM di daerah melalui APBN dapat dirasakan melalui skema Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM. APBN hadir melindungi dan menyejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Sumber: kemenkeu.go.id)

Penjaminan

KUR
Kredit
Usaha
Rakyat

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

merupakan penjaminan dari program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan.



Our Products:



PENJAMINAN KREDIT UMUM



PENJAMINAN KUR



PENJAMINAN PROGRAM



PENJAMINAN DISTRIBUSI BARANG



PENJAMINAN KEAGENAN KARGO



PENJAMINAN SUPPLY CHAIN FINANCING



CUSTOMS BOND



SURETY BOND



PENJAMINAN KREDIT MIKRO



PENJAMINAN BANK GARANSI / KONTRA GARANSI



PENJAMINAN FINTECH



PENJAMINAN KREDIT MULTI GUNA



PENJAMINAN PEMBIAYAAN KEMARITIMAN / JARING



PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG & JASA



PENJAMINAN KPR



PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG



Call Center

1500701

www.jamkrindo.co.id